

Analisis terhadap putusan pengadilan tingi tata usaha negara tentang perburuhan di sektor industri

Imam Soebechi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=107721&lokasi=lokal>

Abstrak

Hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perlu diwujudkan secara optimal. Namun dalam kenyataannya, hubungan industrial merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak, akibatnya masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah.

Diadakannya demokrasi di tempat kerja yang merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang obyektif, maka kebijaksanaan yang diambil secara demokratis dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pengambil keputusan. Di samping itu proses pengambilan keputusan yang demokratis dapat mendorong terciptanya hubungan kemitraan antara pekerja/buruh dan pengusaha yang bersifat permusuhan, namun saling membutuhkan satu sama lain. Dengan kata lain mitransiasi hubungan buruh dan pengusaha di satu pihak bukan hanya sekedar tercapainya konsensus diantara mereka melalui mekanisme konflik (conflict-consensus) dan di lain pihak bukan dengan cara meniadakan konflik dengan cara melarang menggunakan hak untuk mengajukan hak mogok dan hak untuk mengajukan tuntutan/gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial, sebaliknya hubungan kemitraan antara pekerja/buruh dan pengusaha akan tergantung jika salah satu pihak memaksakan kehendak kepada pihak lainnya, sehingga pemenuhan kebutuhan atau kepentingan salah satu pihak dirugikan, oleh sebab itu untuk menghindari situasi konflik yang berkepanjangan, hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha dalam suatu hubungan kerja harus diarahkan pada mitransiasi hubungan kerja sama, sehingga pihak lain tidak perlu lagi menggunakan senjata mogok (lock out) untuk melaksanakan kehendaknya.

Keberadaan konflik atau mogok sebagai senjata sosial dimanapun pemogokan terjadi, pada dasarnya tidak terlepas dari pola hubungan pekerja/buruh dengan pengusaha. Semakin kolaboratif hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha maka semakin rendah frekwensi konflik maupun pemogokan karena segala permasalahan dapat dikomunikasikan dan diselesaikan secara musyawarah. Sebaliknya jika hubungan pekerja/buruh dan pengusaha mendasarkan pada hubungan konflik maka semakin tinggi frekwensi perselisihan hubungan industrial yang diikuti dengan tindakan pemogokan.

Suatu sistem hubungan industrial memandang para pelaku hubungan industrial sebagai mitra yang merupakan kesatuan didalam perusahaan. Oleh karena itu metode dan mekanisme dalam pembinaan sumber daya manusia, sangat menentukan dalam suatu sistem hubungan industrial untuk mencapai ketenangan industrial, sehingga pengusaha tenang berusaha dan pekerja tenteram bekerja. Dengan demikian

pelaksanaan hubungan industrial harus dilakukan dengan kebersamaan dan keterbukaan.